

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### 1.1 Simpulan

Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan hasil penelitian dalam dua bagian, yakni kesimpulan umum dan kesimpulan khusus. Pada simpulan umum, dideskripsikan mengenai hasil penelitian secara general, sehingga tidak disusun secara terkategoriisasi sebagaimana pada rumusan masalah. Sementara simpulan khusus akan dideskripsikan hasil penelitian secara spesifik atau partikular dengan dilakukan kategorisasi yang berbasis pada rumusan masalah penelitian. Berikut deskripsinya:

##### 1.1.1 Simpulan Umum

Moderasi merupakan diskursus akademik, gerakan kultural dan kebijakan politik yang saat ini sedang tumbuh menggeliat. Kehadirannya menjadi oase atau angin segar di tengah terjadinya erosi moral, rabun etika, defisit kepercayaan, runtuhnya nilai, mendangkalnya ilmu, membuncahnya gairah untuk menyebarkan kebohongan dan tumbuhnya industri kebencian, tidak hanya itu juga memuncaknya kekerasan berbasis fanatisme, sektarianisme, intoleransi, dan ekstrimisme di tengah masyarakat. Kenyataan tersebut bila tidak ditangani secara baik dapat membawa Indonesia sebagai negara gagal. Karena itu upaya moderasi, baik sebagai ikhtiar akademik, gerakan kebudayaan maupun kebijakan publik bagi peneliti perlu diapresiasi dan disupport. Moderasi dipilih sebab sejalan dengan Pancasila yang merupakan ideologi tengah atau titik temu. Tengah atau titik temu merupakan bentuk moderasi dari keragaman, yang satu sama lain saling berkorban atau berbagi dan peduli, yang di dalamnya terdapat komitmen kebangsaan, toleransi dan kerjasama, cinta damai dan anti kekerasan.

Sebagai ikhtiar akademik dan gerakan kultural, moderasi relevan dan urgen dilakukan, terutama melalui kelas pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa secara substansial Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya memiliki kaitan atau relevansi yang erat dengan moderasi, baik sebagai diskursus akademik, gerakan kultural maupun kebijakan, terutama pada bagian materi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendidikan kewarganegaraan moderasi dilakukan sebagai bentuk pencegahan konflik (*conflict prevention*), penciptaan perdamaian (*peace making*), pembangunan perdamaian (*peace building*), serta pemeliharaan perdamaian (*peace keeping*), yang kesemuanya harus dipadukan dan dijalankan secara kontinum.

Pendidikan kewarganegaraan sesungguhnya dan senyatanya adalah ruang untuk belajar menjadi mahasiswa, menjadi warga, dan menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu *good and*

*smart citizenship*, di dalamnya mahasiswa akan berjumpa dan belajar makna sesungguhnya dari *demos, nomos, logos* dan *etos*, yang akan memandunya dalam mengarungi hidup baik secara personal, lokal, nasional dan internasional. Sebagai mata kuliah wajib kurikulum, pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi strategis di lembaga pendidikan. Itulah sebabnya kelas pendidikan kewarganegaraan perlu lebih difungsikan untuk menjadi medium transfer pengetahuan, transmisi nilai dan transformasi sikap dan perilaku. Sehingga tata nilai, tata ilmu dan tata laku terjadi di dalamnya. Karena itu moderasi sebagai dasar (titik tumpu), jalan tengah (titik temu) dan arah (titik tuju) perlu diakselerasi dalam kelas pendidikan kewarganegaraan, agar memiliki daya guna, daya ikat, dan daya dobrak bagi peserta didik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa realisasi moderasi melalui kelas pendidikan kewarganegaraan secara signifikan mempengaruhi tumbuhnya komitmen kebangsaan, sikap toleransi dan kerjasama, serta karakter cinta damai dan anti kekerasan pada mahasiswa. Sekalipun tidak berjalan mulus dan tetap mendapat kendala, misalnya pada aspek regulasi, sarana, kompetensi SDM, kurikulum, dll tetapi secara umum diterima, disepakati dan terbukti memberi implikasi.

Seluruh subjek penelitian berpandangan positif terhadap substansi moderasi berwarganegara, tetapi juga menaruh harapan agar moderasi tidak dijadikan alat kekuasaan untuk meminggirkan atau mengkriminalisasi oposisi kekuasaan, menjadi legitimasi pencampuran agama, serta moderasi juga jangan menghilangkan nalar kritis warga. Harapan ini sesungguhnya dapat dimengerti, mengingat moderasi di banyak kalangan masih dipandang hanya berorientasi pada harmoni dan kerukunan. Karena hanya melihat moderasi sebagai sikap tengah, padahal sesungguhnya moderasi tidak hanya bermakna sikap tengah, melainkan juga mengharuskan sikap adil. Dengan kata lain moderasi sesungguhnya tidak hanya berorientasi pada kerukunan dan kedamaian negatif, melainkan juga pada keadilan dan kedamaian positif. Sehingga ancaman spiral kekerasan, banalitas kekerasan dan negara gagal secara perlahan dapat diatasi.

### **1.1.2 Simpulan Khusus**

- a. Relevansi moderasi dengan kelas pendidikan kewarganegaraan terutama terdapat pada dua bagian yakni materi dan tujuan. Pada kedua substansi tersebut keduanya memiliki relevansi. Keduanya memuat materi dan tujuan yang secara substansial memiliki keterkaitan, misalnya konsensus kebangsaan, integrasi nasional, toleransi, perdamaian, keadilan dls. Melalui pendidikan kewarganegaraan moderasi dilakukan sebagai bentuk pencegahan konflik (*conflict prevention*), penciptaan perdamaian (*peace making*), pembangunan perdamaian (*peace building*), dan pemeliharaan perdamaian (*peace keeping*).

M. Yunasri Ridhoh, 2023

MODERASI BERWARGANEGARA MELALUI KELAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBENTUK KARAKTER CINTA DAMAI DAN ANTI KEKERASAN (STUDI DESKRIPTIF DI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Moderasi menjadi isu penting atau memiliki nilai urgensi didasarkan pada (1) pesatnya diskursus akademik mengenai moderasi, tetapi sangat didominasi oleh diskursus keagamaan, sementara problem intoleransi, kekerasan, dan sektarianisme juga terjadi pada semua jenis identitas, karena itu urgen untuk diperluas menjadi moderasi berwarganegara. (2) maraknya kekerasan, termasuk di lingkungan perguruan tinggi, fenomena tersebut menjadi anomali sehingga urgen dilakukan moderasi. (3) dinamika sosiokultural, dimana terdapat ancaman disintegrasi dan memburuknya kohesi sosial ditandai dengan meningkatnya fanatisme, sektarianisme dan kekerasan yang dihadapi bangsa Indonesia, karenanya urgen untuk dilakukan upaya moderasi secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Agar perbedaan tidak dipahami secara negatif, melainkan dipahami sebagai anugrah Tuhan yang mesti disyukuri dan dijaga. (4) dinamika politik kenegaraan, dimana secara politik, pemerintah telah menjadikan moderasi menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Meskipun moderasi masih terbatas pada moderasi beragama. Tetapi diharapkan pemerintah melakukan perluasan agenda moderasi ke arah moderasi berwarganegara.
- c. Pada tahap realisasi moderasi dilaksanakan melalui mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) dimana MKWK berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat, dimana pelaksanaannya diimplementasikan secara aktual, kontekstual dan hadap masalah, hal ini khususnya pada mata kuliah pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Agar lebih efektif dan fungsional ada harapan agar pengimplementasian MKWK dilaksanakan secara terintegratif, dalam arti setiap kelas diisi oleh beragam mahasiswa, misalnya lintas prodi, lintas fakultas yang digabungkan secara acak. Kelas MKWK PKn dianggap ideal untuk dijadikan kelas terintegratif karena semua mahasiswa wajib memprogram mata kuliah tersebut. Mengapa harus terintegratif, sebab berdasarkan teori interpersonal dan *sibling rivalry* mahasiswa yang sejak dini sering berjumpa, akan terhubung secara emosional dengan mahasiswa lainnya, yang diyakini akan membentuk imun kedamaian, sehingga bisa meminimalisir potensi fanatisme, sektarianisme, sikap intoleran dan kekerasan mahasiswa.
- d. Sebagai pendukung didapatkan data bahwa moderasi melalui kelas pendidikan kewarganegaraan di Universitas Negeri Makassar berimplikasi pada terbangunnya (a) komitmen kebangsaan 91,71%; (b) toleransi dan kerjasama 96,57%; (c) cinta damai dan anti kekerasan 95,58%. Dari data tersebut didapatkan data bahwa secara keseluruhan moderasi berwarganegara (mahasiswa) di Universitas Negeri Makassar ialah 94,62%.

## 1.2 Implikasi

### 1.2.1 Implikasi teoritis

- 1) Terkonstruksinya konsep moderasi dalam konteks kewargaan dan dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan.
- 2) Tersusunnya indikator ilmiah untuk memahami moderasi berwarganegara, yang selama ini baik sebagai diskursus akademik, gerakan kultural dan kebijakan publik masih sangat didominasi oleh moderasi beragama.
- 3) Dikembangkannya kurikulum PKn pada perguruan tinggi yang berbasis dan berorientasi pada penguatan komitmen kebangsaan, toleransi dan kerjasama, cinta damai dan anti kekerasan, melalui model pengembangan Tyler, serta moderasi keindonesiaan Nashir.

### 1.2.2 Implikasi praktis

- 1) Tersusunnya konsep kolaborasi pentahelix untuk mengatasi pembelajaran PKn pada Perguruan Tinggi yang bersifat formalitas dan menara gading, dengan melaksanakan kelas PKn melalui pelibatan berbagai pihak (pemerintah, para cendekiawan, masyarakat atau komunitas, swasta juga media).
- 2) Dirampungkannya rekomendasi pembelajaran PKn yang bersifat praktis di Perguruan Tinggi, yaitu pembelajaran PKn di masyarakat atau *citizenship education* sebagai gerakan filantropi (cinta, kesukarelaan dan kesadaran), selaku wahana penguatan kompetensi kewarganegaraan dan pemberdayaan masyarakat yang cinta damai dan anti kekerasan.

## 1.3 Rekomendasi

Rekomendasi merupakan saran atau usul peneliti, yang diperoleh setelah dilakukan penelitian, agar moderasi berwarganegara melalui pendidikan kewarganegaraan benar-benar mampu membawa manfaat positif untuk mencegah ekstrimisme dan kekerasan baik di lingkungan kampus, maupun di lingkungan masyarakat. Adapun rekomendasi dari penelitian ini akan dideskripsikan sebagai berikut:

### 1. Pemerintah

Pemerintah sebagai institusi politik tentu memiliki peran signifikan dalam mendorong terbangunnya kohesi sosial, integrasi nasional dan kedamaian dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan dalam merumuskan kebijakan dalam pencegahan, dan penanganan konflik. Diharapkan melalui penelitian ini pemerintah

dapat mengakomodir konsep moderasi berwarganegara sebagai perspektif baru dan perluasan dari moderasi beragama.

## 2. Perguruan Tinggi

Tentu Perguruan Tinggi memiliki peranan utama dalam membangun kesadaran dan keadaban berwarga. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan, khususnya tata kelola MKWK, dan penyusunan kurikulum pendidikan kewarganegaraan agar lebih diorientasikan pada tumbuhnya budaya damai.

## 3. Dosen

Pada prinsipnya dosen merupakan pihak yang sangat berperan dalam menentukan kualitas pembelajaran. Melalui penelitian ini diharapkan dosen dapat lebih moderat dan menciptakan iklim atau ekosistem moderat, khususnya dalam menjalankan tugas-tugas tridarmanya.

## 4. Mahasiswa

Diharapkan mahasiswa sebagai *agen of change, iron stock, social control* dan *moral of force*, tidak lagi terjebak atau menjebak diri dalam spiral kekerasan. Penelitian ini dapat menjadi refleksi kritis bagi mahasiswa untuk merumuskan ulang visi kemahasiswaannya, sehingga ke depan dapat menjadi *peacemaker*, lokomotif *moderation project* agar tercipta kedamaian di semesta.

## 5. Civitas Akademika Pendidikan Kewarganegaraan

Tentu masyarakat akademik Pendidikan Kewarganegaraan perlu menjadikan moderasi berwarganegara sebagai ruang strategis untuk lebih memfungsikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang belum optimal atau hadap masalah. Terlebih praktis pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang kadang masih bersifat formalitas dan doktriner.

## 6. Masyarakat dan Institusi

Konflik, intoleransi, kekerasan dan sikap sejenisnya tentu tidak diinginkan oleh masyarakat dan institusi, karenanya moderasi ini perlu dilakukan, karena moderasi yang dilakukan pada mahasiswa tidak akan efektif bila lingkungan masyarakat dan institusi sekitar juga tidak dimoderasi.

## 7. Peneliti Selanjutnya

Karena penelitian ini berbasis metode studi kasus tentu sangat khas atau spesifik ke perguruan tinggi tertentu, sehingga sangat mungkin berbeda dengan perguruan tinggi

lainnya. Maka peneliti selanjutnya, akan lebih bijaksana apabila berfokus untuk mendalami substansi yang bersifat teknis, mengenai integrasi moderasi ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Tentu peneliti selanjutnya juga perlu menganalisis problematik pada moderasi berwarganegara berbasis keilmuannya, agar bisa mengatasi problematik tersebut, bahkan bisa mengembangkan kajian keilmuan dan pembelajaran setiap disiplin ilmu.

#### **1.4 Dalil-dalil**

Merujuk terhadap hasil riset, maka peneliti bisa mengembangkan dalil-dalil penelitian, sebagai berikut:

1. Moderasi bukan tidak memiliki prinsip atau pendirian, melainkan sikap tengah-tengah, mencari titik temu diantara ekstrimitas perbedaan.
2. Perbedaan identitas diantara warga bangsa bahkan warga dunia mesti dipahami sebagai anugrah Tuhan yang harus disyukuri dan dijaga.
3. Karakter moderat jangan dipandang sebagai proyek liberalisme, tetapi sebagai esensi Pancasila.
4. Dalam kehidupan yang majemuk diperlukan upaya moderasi berwarganegara melalui tata nilai, tata ilmu, tata laku dan tata kelola.
5. Tata nilai, tata ilmu dan tata laku merupakan fungsi utama kelas PKn.
6. Kelas PKn merupakan wahana membentuk karakter moderat warganegara berupa komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, cinta damai, dan sikap adil.
7. Materi pembelajaran PKn mengandung nilai, ilmu dan norma yang beririsan, bertalian dan memiliki relevansi dengan upaya moderasi berwarganegara.
8. Moderasi berwarganegara bukan berarti menghilangkan identitas atau mencampuradukkan identitas, misalnya agama melainkan cara hidup yang tengah-tengah, menghindari keekstreman, mengurangi kekerasan dan tidak berlebih-lebihan.